



**RASA INGIN TAHU SEBAGAI STRATEGI DEPOLARISASI:
DISKURSUS POLITIK, IDENTITAS KELOMPOK, DAN
ETIKA MENDENGARKAN DALAM DEMOKRASI
KONTEMPORER**

Hudallah
IAIMA Darul Fikri Indramayu
hudallah9@gmail.com

Rifqi
Darul Ma'arif Indramayu University
rifqi816@gmail.com

Copyright © 2025 by Authors, Published by **Lentera Demokrasi: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Hukum, Ekonomi dan Pemerintahan**. This is an open access article under the CC BY License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>).

Received: Oktober 2025
Accepted: Desember 2025

Revised : November 2025
Available online : Desember 2025

How to Cite: Author. (2025). Title. *Lentera Demokrasi: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Hukum, Ekonomi dan Pemerintahan*, 1(4), 176–184. <https://doi.org/10.61166/ld.v1i4.33>

ABSTRACT

This article aims to analyze the role of curiosity as a psychological and ethical strategy in overcoming political polarization and enhancing the quality of democratic discourse. This study employs a qualitative method with a literature review approach, analyzing recent empirical findings from political psychology—specifically the research of Todd Kashdan and colleagues—as well as theoretical reflections on public discourse and the ethics of listening. The results of the study indicate that the primary barrier in cross-partisan political conversation is not merely differences in viewpoints, but rather misunderstandings regarding the level of intellectual openness within one's own group (in-group misperception). Curiosity is proven to be positively associated with openness, intellectual humility, and reduced social distance between political groups. Furthermore, simple psychological interventions that correct perceptions of internal group norms are capable of increasing curiosity and the quality of political interaction. This article concludes that curiosity and the practice of empathetic listening are essential foundations for depolarization and the strengthening of discourse ethics in contemporary democracy.

KEY WORDS: curiosity, political polarization, civil discourse, group identity, deliberative democracy

ABSTRAK

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis peran rasa ingin tahu (curiosity) sebagai strategi psikologis dan etis dalam mengatasi polarisasi politik dan meningkatkan kualitas diskursus demokratis. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur, menganalisis temuan empiris terbaru dari psikologi politik, khususnya penelitian Todd Kashdan dan koleganya, serta refleksi teoretis mengenai diskursus publik dan etika mendengarkan. Hasil kajian menunjukkan bahwa hambatan utama dalam percakapan politik lintas partisan bukan semata perbedaan pandangan, melainkan kesalahpahaman mengenai tingkat keterbukaan intelektual kelompok sendiri (in-group misperception). Rasa ingin tahu terbukti berasosiasi positif dengan keterbukaan, kerendahan hati intelektual, dan berkurangnya jarak sosial antar kelompok politik. Lebih jauh, intervensi psikologis sederhana yang mengoreksi persepsi tentang norma kelompok internal mampu meningkatkan rasa ingin tahu dan kualitas interaksi politik. Artikel ini menyimpulkan bahwa rasa ingin tahu dan praktik mendengarkan secara empatik merupakan fondasi penting bagi depolarisasi dan penguatan etika diskursus dalam demokrasi kontemporer.

KATA KUNCI: rasa ingin tahu, polarisasi politik, diskursus sipil, identitas kelompok, demokrasi deliberatif

INTRODUCTION

Setiap musim liburan kerap disertai dengan peringatan yang sama: hindari percakapan politik, terutama jika anggota keluarga atau kerabat memiliki pandangan politik yang berbeda. Nasihat ini berangkat dari asumsi pesimistis bahwa perbedaan politik hampir selalu berujung pada konflik, ketegangan emosional, dan keretakan relasi sosial. Dalam konteks politik Amerika Serikat, asumsi tersebut semakin menguat seiring meningkatnya polarisasi politik yang tajam dalam dua dekade terakhir, ditandai oleh mengerasnya identitas partisan dan menurunnya toleransi terhadap perbedaan pandangan (Iyengar & Westwood, 2015).

Kehidupan politik kontemporer ditandai oleh meningkatnya interparty animus, yakni permusuhan antarkelompok politik yang tidak hanya bersifat ideologis, tetapi juga emosional dan moral. Studi Mason (2018) menunjukkan bahwa afiliasi politik di Amerika Serikat telah bertransformasi menjadi identitas sosial yang kuat, sehingga perbedaan politik kerap dipersepsikan sebagai perbedaan nilai moral dan karakter personal. Dalam kondisi ini, lawan politik tidak lagi dipandang sebagai warga negara dengan argumen alternatif, melainkan sebagai pihak yang tidak bermoral, tidak rasional, atau bahkan berbahaya. Akibatnya, banyak warga lebih memilih menjaga jarak sosial ketimbang terlibat dalam dialog, serta mengedepankan penilaian moral dibandingkan keterlibatan intelektual yang reflektif.

Fenomena tersebut berdampak serius terhadap kualitas demokrasi. Demokrasi deliberatif, sebagaimana ditegaskan oleh Habermas (1996), mensyaratkan adanya ruang publik yang memungkinkan pertukaran argumen secara rasional, setara, dan terbuka. Namun, meningkatnya polarisasi emosional dan dehumanisasi politik justru mempersempit ruang deliberasi tersebut. Percakapan politik sehari-hari (baik di ruang keluarga, komunitas, maupun media sosial) sering kali dipenuhi dengan sikap defensif, saling menyalahkan, dan keengganan untuk mendengarkan. Pola ini secara gradual mengikis kapasitas warga untuk mempertimbangkan pandangan yang berbeda dan melemahkan fondasi etika diskursus demokratis.

Dalam situasi demikian, kegagalan percakapan politik sering dianggap sebagai keniscayaan. Nasihat populer (seperti menghindari topik politik, mengalihkan pembicaraan, atau menghentikan diskusi) dibangun di atas premis bahwa ketidaksetujuan adalah resep pasti bagi kehancuran relasi sosial. Sejumlah penelitian terdahulu memang menyoroti bahwa paparan terhadap pandangan politik yang bertentangan dapat meningkatkan polarisasi dan resistensi kognitif, terutama ketika identitas kelompok terancam (Taber & Lodge, 2006). Namun, pendekatan penghindaran ini justru memperkuat fragmentasi sosial dan menghilangkan peluang

pembelajaran politik lintas perbedaan.

Penelitian-penelitian sebelumnya mengenai depolarisasi umumnya berfokus pada strategi persuasif, koreksi informasi, atau desain institusional dialog lintas kelompok (Mutz, 2006; Fishkin, 2018). Meskipun penting, pendekatan tersebut sering kali mengabaikan dimensi psikologis mikro yang mendahului percakapan politik itu sendiri, khususnya keyakinan individu tentang sikap dan norma kelompok politiknya sendiri. Di sinilah letak celah penelitian (research gap) yang ingin diisi oleh artikel ini.

Artikel ini berangkat dari temuan empiris terbaru dalam psikologi politik yang menunjukkan bahwa akar persoalan percakapan politik yang buntu bukan terletak semata-mata pada perbedaan pandangan, melainkan pada keyakinan keliru mengenai seberapa terbuka atau tertutup pikiran orang-orang dalam kelompok politik internal (*in-group misperception*). Penelitian Kashdan et al. (2025) menunjukkan bahwa individu secara sistematis meremehkan tingkat keterbukaan intelektual dan kerendahan hati kognitif kelompok politik mereka sendiri, sebuah kesalahpahaman yang memicu sikap defensif dan penghindaran sebelum dialog dimulai.

Dengan menempatkan rasa ingin tahu (*curiosity*) sebagai variabel kunci, artikel ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana perubahan persepsi psikologis dan norma kelompok dapat membuka kembali ruang dialog politik yang lebih sehat. Berbeda dari pendekatan persuasif yang berupaya mengubah pandangan politik, fokus artikel ini adalah pada transformasi sikap epistemik—dari kepastian moral menuju kerendahan hati dan keterbukaan untuk memahami. Curiosity dipahami tidak hanya sebagai disposisi psikologis individual, tetapi juga sebagai fondasi etis bagi diskursus publik yang demokratis.

Kontribusi utama artikel ini bersifat teoretis dan konseptual. Pertama, artikel ini mengintegrasikan temuan empiris psikologi politik dengan kerangka teori demokrasi deliberatif, khususnya gagasan tentang rasionalitas komunikatif dan etika diskursus. Kedua, artikel ini memperluas pemahaman tentang depolarisasi politik dengan menekankan pentingnya persepsi norma kelompok internal, bukan semata relasi dengan kelompok lawan. Ketiga, artikel ini menawarkan perspektif normatif bahwa praktik mendengarkan dengan rasa ingin tahu merupakan bentuk etika publik yang relevan untuk memperkuat kohesi sosial dan kualitas demokrasi di tengah polarisasi yang semakin mengeras.

RESEARCH METHODS

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis studi literatur (*library research*). Data diperoleh dari artikel jurnal ilmiah, laporan penelitian psikologi politik, serta tulisan reflektif-akademik yang relevan dengan tema polarisasi politik dan diskursus publik. Sumber utama penelitian ini adalah artikel Kashdan et al. (2025) yang dipublikasikan dalam *Scientific Reports*, serta tulisan Pamela Paresky (2025) dalam *Psychology Today*.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dan penelusuran sistematis terhadap sumber-sumber sekunder yang kredibel. Analisis data menggunakan pendekatan deskriptif-analitis dengan menekankan interpretasi kritis terhadap temuan empiris dan konteks sosial-politik yang melatarbelakanginya. Pendekatan ini memungkinkan integrasi antara data psikologis dan refleksi normatif mengenai demokrasi dan etika diskursus.

RESULTS AND DISCUSSION

Polarisasi Politik dan Psikologi Kesukuan

Hasil analisis menunjukkan bahwa kebuntuan percakapan politik tidak dapat dilepaskan dari beroperasinya psikologi kesukuan (*tribal psychology*) dalam interaksi sosial-politik. Ketika perbedaan pandangan muncul, individu secara refleks mengaktifkan mekanisme kategorisasi sosial yang membelah dunia ke dalam “kami” dan “mereka”. Proses kategorisasi ini bersifat otomatis dan afektif, sehingga mendahului penilaian rasional. Lawan politik kemudian

dipersepsikan bukan sebagai subjek rasional dengan pengalaman hidup yang kompleks, melainkan sebagai representasi kelompok moral yang negatif—bodoh, sesat, tidak bermoral, atau bahkan berbahaya.

Temuan ini sejalan dengan teori identitas sosial yang dikembangkan oleh Tajfel dan Turner, yang menegaskan bahwa individu memperoleh rasa harga diri (*self-esteem*) dari afiliasi kelompok, sehingga perbedaan antarkelompok kerap dimaknai sebagai ancaman terhadap identitas diri (Tajfel & Turner, 1979). Dalam konteks politik modern, identitas partisan tidak lagi bersifat instrumental, melainkan telah bertransformasi menjadi identitas sosial yang emosional dan eksklusif. Mason (2018: 42) menunjukkan bahwa ketika identitas politik beririsan dengan identitas sosial lain (seperti ras, agama, dan kelas) polarisasi menjadi semakin mengeras karena perbedaan politik diasosiasikan dengan perbedaan nilai moral yang mendasar.

Ancaman identitas ini diperkuat oleh berbagai bias kognitif yang bekerja secara simultan. Confirmation bias mendorong individu untuk hanya menerima informasi yang sejalan dengan keyakinan awal, sementara bandwagon effect memperkuat konformitas terhadap pandangan mayoritas kelompok demi mempertahankan rasa memiliki. Pada saat yang sama, in-group bias menyebabkan individu menilai kelompok sendiri secara lebih positif dan kelompok lain secara lebih negatif (Kahneman, 2011: 112). Kombinasi bias-bias ini menciptakan apa yang Sunstein sebut sebagai echo chambers, yakni ruang kognitif tertutup yang mempersempit paparan terhadap perspektif alternatif (Sunstein, 2017: 59).

Dalam kondisi demikian, politik tidak lagi berfungsi sebagai arena deliberasi rasional sebagaimana dibayangkan dalam teori demokrasi deliberatif, melainkan berubah menjadi medan pertahanan identitas kolektif. Argumen politik tidak dinilai berdasarkan kekuatan rasionalnya, tetapi berdasarkan asal kelompok yang mengemukakannya. Habermas menyebut kondisi ini sebagai kegagalan rasionalitas komunikatif, ketika orientasi pada saling memahami digantikan oleh orientasi pada kemenangan simbolik (Habermas, 1996: 322).

Dampak psikologis dari kondisi ini adalah meningkatnya jarak sosial dan menurunnya kemauan untuk berdialog lintas perbedaan. Studi Iyengar dan Westwood (2015: 694) menunjukkan bahwa afeksi negatif terhadap lawan politik bahkan lebih kuat dibandingkan prasangka rasial, serta berpengaruh signifikan terhadap preferensi sosial, seperti keengganan bertetangga, bekerja sama, atau menjalin relasi personal dengan pendukung partai lawan. Temuan ini mempertegas bahwa polarisasi politik telah bergerak dari ranah ideologis ke ranah afektif dan relasional.

Lebih jauh, polarisasi afektif ini menciptakan lingkaran setan (*vicious cycle*) dalam percakapan politik. Persepsi bahwa kelompok lawan bersifat irasional dan tertutup mendorong individu untuk bersikap defensif atau menghindari dialog. Sikap tersebut pada gilirannya dikonfirmasi oleh kelompok lawan sebagai bukti ketertutupan dan niat buruk, sehingga memperkuat stereotip awal. Proses ini menjelaskan mengapa banyak percakapan politik terasa buntu bahkan sebelum dimulai.

Dengan demikian, temuan dalam bagian ini menegaskan bahwa kebuntuan percakapan politik bukan sekadar persoalan perbedaan ide atau kurangnya informasi, melainkan persoalan psikologis dan emosional yang terinternalisasi dalam identitas kelompok. Tanpa intervensi yang menysasar dimensi psikologis ini, upaya memperbaiki kualitas diskursus politik cenderung berakhir pada kegagalan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan alternatif yang mampu melemahkan mekanisme psikologi kesukuan dan membuka kembali ruang interaksi yang lebih reflektif dan manusiawi—sebuah kebutuhan yang kemudian dijawab melalui konsep rasa ingin tahu (*curiosity*) sebagai strategi depolarisasi.

Rasa Ingin Tahu sebagai Strategi Radikal dalam Diskursus Politik

Berbeda dari pendekatan persuasif yang menekankan argumentasi, debat, dan perubahan sikap secara langsung, strategi yang ditawarkan oleh Kashdan dan koleganya justru bersifat radikal dalam kesederhanaannya, yakni mengganti kepastian dengan rasa ingin tahu (*curiosity*).

Radikalitas pendekatan ini terletak pada pergeseran orientasi komunikasi politik: dari upaya “mengoreksi” pandangan pihak lain menuju upaya memahami bagaimana dan mengapa pandangan tersebut terbentuk. Dalam kerangka ini, curiosity diposisikan sebagai disposisi epistemik yang memungkinkan individu menanggukhan penilaian awal, membuka diri terhadap kompleksitas pengalaman orang lain, serta mengembangkan kerendahan hati intelektual.

Secara psikologis, rasa ingin tahu berfungsi sebagai mekanisme korektif terhadap ilusi pemahaman diri (*illusion of explanatory depth*). Nicholas Epley menegaskan bahwa manusia sering kali terlalu percaya diri terhadap apa yang mereka pikirkan dan rasakan, padahal proses introspeksi kerap bersifat parsial, bias, dan menyesatkan (Epley, 2014: 37). Dalam konteks percakapan politik, ilusi ini mendorong individu untuk meyakini bahwa posisi mereka sepenuhnya rasional dan berbasis fakta, sementara posisi pihak lain dianggap lahir dari ketidaktahuan atau niat buruk. Curiosity bekerja dengan membongkar ilusi tersebut, menggeser fokus dari membenaran diri menuju eksplorasi pemahaman yang lebih mendalam.

Dengan demikian, curiosity tidak hanya mengarahkan perhatian ke luar (kepada argumen dan pengalaman orang lain) tetapi juga ke dalam, yakni pada kesadaran akan keterbatasan pengetahuan dan kerangka berpikir diri sendiri. Kesadaran reflektif ini menjadi prasyarat penting bagi dialog politik yang tidak defensif. Penelitian dalam psikologi kepribadian menunjukkan bahwa individu dengan tingkat curiosity yang tinggi cenderung memiliki fleksibilitas kognitif yang lebih besar dan lebih mampu mentoleransi ambiguitas (Kashdan & Silvia, 2009: 371).

Pendekatan ini sejalan dengan konsep epistemic humility dalam filsafat pengetahuan, yang menekankan pengakuan atas keterbatasan kognitif sebagai fondasi pencarian kebenaran yang bertanggung jawab (Medina, 2013: 84). Epistemic humility tidak menuntut individu untuk merelativisasi seluruh keyakinannya, melainkan untuk menyadari bahwa keyakinan tersebut selalu bersifat terbuka terhadap koreksi. Dalam diskursus politik, sikap ini memungkinkan individu mempertahankan komitmen normatifnya sembari tetap membuka ruang bagi pembelajaran dari perspektif lain.

Lebih jauh, rasa ingin tahu juga memiliki implikasi normatif dalam teori demokrasi deliberatif. Habermas menegaskan bahwa rasionalitas komunikatif mensyaratkan orientasi pada saling memahami (*mutual understanding*), bukan sekadar pada kemenangan argumentatif (Habermas, 1996: 286). Curiosity berfungsi sebagai kondisi psikologis yang menopang orientasi tersebut, karena mendorong individu untuk mendengarkan argumen lawan politik sebagai kontribusi potensial terhadap pemahaman bersama, bukan sebagai ancaman terhadap identitas kelompok.

Dalam praktiknya, rasa ingin tahu memungkinkan individu keluar dari pola komunikasi defensif yang ditandai oleh penyangkalan, serangan balik, dan penghindaran. Sebaliknya, curiosity membuka ruang bagi pembelajaran timbal balik (*reciprocal learning*), di mana percakapan politik dipahami sebagai proses ko-konstruksi makna. Proses ini dapat berlangsung tanpa menuntut individu untuk mengorbankan identitas atau keyakinan politiknya. Dengan kata lain, curiosity tidak berfungsi untuk mencairkan perbedaan, melainkan untuk mengelola perbedaan secara lebih reflektif dan manusiawi.

Dengan demikian, pengembangan rasa ingin tahu sebagai disposisi psikologis dan etis menawarkan jalan alternatif untuk mereduksi polarisasi politik yang berakar pada psikologi kesukuan. Alih-alih memperdalam jurang perbedaan melalui kepastian moral yang kaku, curiosity membuka kemungkinan bagi diskursus politik yang lebih inklusif, dialogis, dan selaras dengan etika demokrasi deliberatif.

Temuan Empiris tentang Curiosity dalam Perspektif Demokrasi Deliberatif

Temuan empiris Kashdan et al. (2025) memperoleh signifikansi teoretis yang lebih mendalam apabila dibaca dalam kerangka demokrasi deliberatif sebagaimana dirumuskan oleh Jürgen Habermas. Dalam teori tindakan komunikatif dan demokrasi deliberatif, Habermas menekankan bahwa legitimasi demokratis hanya dapat tercapai apabila proses pembentukan

kehendak politik berlangsung melalui diskursus yang rasional, inklusif, dan berorientasi pada saling memahami (*mutual understanding*), bukan semata pada kemenangan strategis (Habermas, 1996: 287).

Salah satu prasyarat utama rasionalitas komunikatif adalah kesediaan partisipan untuk mengakui kemungkinan bahwa pandangan mereka dapat dikritik dan direvisi. Dalam terminologi Habermas, diskursus yang ideal menuntut keterbukaan terhadap klaim kebenaran (*truth claims*), klaim normatif (*rightness claims*), dan klaim kejujuran (*sincerity claims*) yang diajukan oleh pihak lain. Namun, temuan Kashdan et al. menunjukkan bahwa hambatan terhadap diskursus semacam ini sering kali tidak terletak pada substansi perbedaan pandangan, melainkan pada asumsi psikologis awal bahwa kelompok sendiri tidak menghargai keterbukaan dan kerendahan hati intelektual.

Kesalahpahaman terhadap norma kelompok internal (*misperceived in-group norms*) ini memiliki implikasi langsung terhadap kegagalan rasionalitas komunikatif. Ketika individu meyakini bahwa keterbukaan dan perubahan pandangan dianggap sebagai kelemahan atau pengkhianatan kelompok, orientasi komunikatif bergeser menjadi orientasi strategis, yakni upaya mempertahankan posisi dan identitas kelompok. Dalam istilah Habermas, kondisi ini mencerminkan kolonisasi ruang diskursus oleh logika strategis, di mana komunikasi tidak lagi diarahkan pada pencarian pemahaman bersama, melainkan pada perlindungan kepentingan dan citra kelompok (Habermas, 1987: 285).

Dalam konteks ini, rasa ingin tahu (*curiosity*) berfungsi sebagai prasyarat psikologis bagi pemulihan orientasi komunikatif. Temuan Kashdan et al. (2025) bahwa *curiosity* berkorelasi dengan rendahnya defensivitas, meningkatnya keterbukaan belajar, dan berkurangnya jarak sosial menunjukkan bahwa rasa ingin tahu menciptakan kondisi subjektif yang memungkinkan individu kembali terlibat dalam diskursus deliberatif. *Curiosity* mendorong individu untuk menanggukkan klaim kepastian moral dan membuka diri terhadap kemungkinan bahwa pandangan pihak lain mengandung rasionalitas yang layak dipertimbangkan.

Lebih jauh, intervensi psikologis yang dirancang Kashdan et al. (dengan mengoreksi persepsi keliru tentang keterbukaan kelompok sendiri) dapat dipahami sebagai upaya merekonstruksi kondisi ideal diskursus pada level mikro. Dengan menunjukkan bahwa keterbukaan merupakan norma yang sah dalam kelompok internal, intervensi ini memberikan legitimasi sosial bagi individu untuk bersikap reflektif dan dialogis. Dalam kerangka Habermas, legitimasi semacam ini penting karena diskursus tidak pernah berlangsung dalam ruang hampa, melainkan selalu terikat pada norma dan ekspektasi sosial yang membentuk kemungkinan partisipasi setara (Habermas, 1996: 306).

Dengan demikian, temuan Kashdan et al. memperluas teori demokrasi deliberatif dengan menambahkan dimensi psikologis yang selama ini kurang mendapatkan perhatian. Jika Habermas menekankan pentingnya desain institusional dan prosedural bagi diskursus publik, penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan deliberasi juga bergantung pada disposisi epistemik individu dan persepsi normatif dalam kelompok sosial. *Curiosity* berfungsi sebagai jembatan antara struktur normatif demokrasi deliberatif dan kondisi psikologis partisipan yang memungkinkan struktur tersebut berfungsi secara efektif.

Dalam konteks polarisasi politik kontemporer, integrasi antara temuan empiris tentang *curiosity* dan kerangka demokrasi deliberatif menunjukkan bahwa revitalisasi ruang publik tidak cukup dilakukan melalui reformasi institusional atau seruan normatif semata. Diperlukan pula intervensi yang menysar dimensi psikologis warga negara agar orientasi komunikatif (sebagaimana diidealkan Habermas) dapat dihidupkan kembali dalam praktik diskursus politik sehari-hari.

Identitas Kelompok, Norma Sosial, dan Etika Mendengarkan

Sebagai makhluk sosial, individu tidak membentuk sikap dan perilakunya secara otonom, melainkan selalu berada dalam jaringan norma, ekspektasi, dan penilaian sosial kelompok tempat ia berafiliasi. Kashdan et al. menegaskan bahwa "*in-groups function as a potent source of information*

about what to value and how to behave” (Kashdan et al., 2025). Artinya, kelompok internal tidak hanya menyediakan identitas sosial, tetapi juga berfungsi sebagai kerangka normatif yang menentukan batasan perilaku yang dianggap sah, dapat diterima, atau justru menyimpang.

Dalam konteks polarisasi politik, norma kelompok sering kali membingkai keterbukaan dan kesediaan mendengarkan sebagai tanda kelemahan, ketidakloyalan, atau bahkan pengkhianatan terhadap kelompok. Ketika keterbukaan dipersepsikan sebagai norma yang menyimpang, individu cenderung menutup diri demi mempertahankan rasa memiliki (*sense of belonging*) dan menghindari sanksi sosial. Fenomena ini sejalan dengan temuan Cialdini dan Goldstein (2004: 606) yang menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap norma sosial sering kali lebih menentukan perilaku individu dibandingkan pertimbangan rasional personal.

Sebaliknya, ketika keterbukaan dan rasa ingin tahu dipahami sebagai norma yang sah dan dihargai dalam kelompok, individu memperoleh legitimasi psikologis untuk bersikap reflektif dan dialogis. Temuan Kashdan et al. (2025) menunjukkan bahwa koreksi terhadap persepsi keliru mengenai norma kelompok internal mampu meningkatkan rasa ingin tahu dan keterbukaan tanpa harus mengubah keyakinan politik substantif individu. Hal ini menegaskan bahwa perubahan kualitas diskursus politik dapat dimulai dari rekonstruksi norma sosial internal, bukan semata dari interaksi dengan kelompok lawan.

Dalam kerangka ini, praktik mendengarkan dengan rasa ingin tahu tidak dapat dipahami semata-mata sebagai keterampilan komunikasi interpersonal, melainkan sebagai praktik etika publik yang memiliki dimensi normatif dan politis. Habermas menegaskan bahwa diskursus demokratis mensyaratkan kesediaan partisipan untuk mendengarkan argumen orang lain sebagai subjek yang setara, bukan sebagai objek yang harus dikalahkan atau direduksi menjadi stereotip (Habermas, 1996: 305). Mendengarkan menjadi tindakan normatif yang menopang rasionalitas komunikatif, karena memungkinkan klaim-klaim normatif dan faktual diuji melalui pertukaran alasan yang setara.

Lebih jauh, etika mendengarkan juga berkaitan dengan pengakuan (*recognition*) terhadap martabat moral pihak lain. Dalam perspektif ini, mendengarkan bukan sekadar menerima informasi, melainkan mengakui keberadaan pihak lain sebagai subjek moral yang berhak didengar dan dipahami. Pernyataan William Stringfellow bahwa mendengarkan adalah “tindakan cinta yang paling purba” menggarisbawahi dimensi moral dan relasional dari praktik ini. Mendengarkan menuntut penanggulangan ego, pengendalian dorongan untuk menang, serta kesediaan untuk hadir secara utuh dalam relasi dengan pihak lain.

Dalam konteks polarisasi politik yang semakin mengeras, etika mendengarkan berbasis rasa ingin tahu memiliki implikasi yang luas bagi keberlanjutan demokrasi deliberatif. Tanpa praktik mendengarkan yang reflektif dan empatik, ruang publik cenderung terfragmentasi menjadi arena monolog paralel yang saling menegasikan. Sebaliknya, ketika mendengarkan dipraktikkan sebagai norma etis bersama, ia berfungsi sebagai mekanisme pemulihan kepercayaan, pengurangan jarak sosial, dan penguatan kohesi sosial lintas perbedaan.

Dengan demikian, integrasi antara identitas kelompok, norma sosial, dan etika mendengarkan menunjukkan bahwa perbaikan kualitas diskursus politik tidak hanya bergantung pada desain institusional atau kapasitas argumentatif warga, tetapi juga pada pembentukan norma etis yang menghargai rasa ingin tahu, keterbukaan, dan pengakuan terhadap sesama sebagai subjek moral. Dalam kerangka demokrasi deliberatif, etika mendengarkan bukanlah pelengkap, melainkan fondasi normatif bagi praktik demokrasi yang inklusif dan berkelanjutan.

CONCLUSION

Artikel ini menunjukkan bahwa kebuntuan percakapan politik dalam masyarakat yang terpolarisasi tidak semata-mata disebabkan oleh perbedaan pandangan ideologis, melainkan oleh mekanisme psikologis dan normatif yang bekerja dalam identitas kelompok. Polarisasi politik

kontemporer, khususnya dalam konteks Amerika Serikat, telah menggeser politik dari arena deliberasi rasional menuju medan pertahanan identitas, di mana lawan politik dipersepsikan secara moralistik dan dehumanistik. Dalam kondisi ini, bias kognitif dan psikologi kesukuan memperkuat jarak sosial serta menurunkan kemauan untuk berdialog.

Berdasarkan analisis terhadap temuan empiris Kashdan et al. (2025), artikel ini menegaskan bahwa salah satu hambatan utama diskursus politik terletak pada persepsi keliru mengenai norma kelompok internal. Individu cenderung meremehkan tingkat keterbukaan dan kerendahan hati intelektual kelompok politiknya sendiri, sehingga bersikap defensif bahkan sebelum percakapan dimulai. Temuan ini memperluas pemahaman tentang polarisasi politik dengan menyoroti peran penting persepsi normatif in-group, bukan semata relasi antagonistik dengan out-group.

Rasa ingin tahu (*curiosity*) muncul sebagai variabel kunci yang mampu mengintervensi kebuntuan tersebut. Curiosity berfungsi sebagai disposisi epistemik yang mendorong kerendahan hati intelektual, mengurangi defensivitas, serta membuka ruang pembelajaran timbal balik dalam percakapan politik. Temuan bahwa curiosity dapat ditingkatkan melalui intervensi psikologis singkat yang mengoreksi persepsi norma kelompok internal menunjukkan bahwa depolarisasi politik tidak selalu memerlukan perubahan keyakinan substantif, melainkan perubahan orientasi epistemik dan ekspektasi sosial.

Dalam perspektif demokrasi deliberatif Jürgen Habermas, temuan ini memiliki implikasi teoretis yang signifikan. Curiosity dapat dipahami sebagai prasyarat psikologis bagi rasionalitas komunikatif, karena memungkinkan individu berorientasi pada saling memahami (*mutual understanding*) alih-alih pada kemenangan strategis. Dengan demikian, revitalisasi diskursus publik tidak hanya bergantung pada desain institusional dan prosedural, tetapi juga pada disposisi psikologis dan etika warga negara dalam berkomunikasi.

Artikel ini juga menegaskan bahwa praktik mendengarkan dengan rasa ingin tahu bukan sekadar keterampilan komunikasi interpersonal, melainkan praktik etika publik yang fundamental. Etika mendengarkan, yang menuntut pengakuan terhadap martabat moral pihak lain sebagai subjek setara, menjadi fondasi normatif bagi pemulihan kepercayaan, pengurangan jarak sosial, dan keberlanjutan demokrasi deliberatif di tengah polarisasi yang semakin mengeras.

Dengan demikian, kontribusi utama artikel ini adalah integrasi antara temuan empiris psikologi politik dan kerangka normatif demokrasi deliberatif. Artikel ini menunjukkan bahwa perbaikan kualitas diskursus politik dapat dimulai dari level mikro (yakni rekonstruksi norma kelompok dan disposisi epistemik individu) sebagai pelengkap penting bagi reformasi institusional demokrasi. Curiosity, dalam hal ini, bukan sekadar sikap personal, tetapi modal etis dan demokratis yang esensial bagi kehidupan politik yang inklusif dan manusiawi.

BIBLIOGRAPHY

- Cialdini, R. B., & Goldstein, N. J. (2004). Social influence: Compliance and conformity. *Annual Review of Psychology*, 55, 591–621.
- Epley, N. (2014). *Mindwise: Why We Misunderstand What Others Think, Believe, Feel, and Want*. New York: Knopf.
- Fishkin, J. S. (2018). *Democracy When the People Are Thinking: Revitalizing Our Politics Through Public Deliberation*. Oxford: Oxford University Press.
- Habermas, J. (1987). *The Theory of Communicative Action, Vol. 2: Lifeworld and System*. Boston: Beacon Press.
- Habermas, J. (1996). *Between Facts and Norms: Contributions to a Discourse Theory of Law and Democracy*. Cambridge: Polity Press.

- Iyengar, S., & Westwood, S. J. (2015). Fear and loathing across party lines: New evidence on group polarization. *American Journal of Political Science*, 59(3), 690–707.
- Iyengar, S., Lelkes, Y., Levendusky, M., Malhotra, N., & Westwood, S. J. (2019). The origins and consequences of affective polarization. *Annual Review of Political Science*, 22, 129–146.
- Kahneman, D. (2011). *Thinking, Fast and Slow*. New York: Farrar, Straus and Giroux.
- Kashdan, T. B., & Silvia, P. J. (2009). Curiosity and interest: The benefits of thriving on novelty and challenge. *Journal of Positive Psychology*, 4(5), 367–374.
- Kashdan, T. B., McKnight, P. E., Kelso, K., Craig, L., & Gross, M. (2025). Enhancing curiosity with a wise intervention to improve political conversations and relationships. *Scientific Reports*, 15, Article 40272.
- Mason, L. (2018). *Uncivil Agreement: How Politics Became Our Identity*. Chicago: University of Chicago Press.
- Medina, J. (2013). *The Epistemology of Resistance: Gender and Racial Oppression, Epistemic Injustice, and Resistant Imaginations*. Oxford: Oxford University Press.
- Mutz, D. C. (2006). *Hearing the Other Side: Deliberative versus Participatory Democracy*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Paresky, P. (2025). *Why Political Conversations Go Wrong—and How to Fix Them*. Psychology Today.
- Sunstein, C. R. (2017). *#Republic: Divided Democracy in the Age of Social Media*. Princeton: Princeton University Press.
- Taber, C. S., & Lodge, M. (2006). Motivated skepticism in the evaluation of political beliefs. *American Journal of Political Science*, 50(3), 755–769.
- Tajfel, H., & Turner, J. C. (1979). An integrative theory of intergroup conflict. In *The Social Psychology of Intergroup Relations*.